

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Keunikan budaya Indonesia tercermin dari adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragam dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut suku. Suku bangsa yang terdapat di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 740 suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satu suku bangsa tersebut adalah Madura. Madura merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam cakupan Wilayah Provinsi Jawa Timur. Letak pulau tersebut berada di sebelah timur pulau Jawa (Farid, 2011: 36).

Mendengar kata Madura, dalam benak sebagian orang akan terbayang , perilaku yang kasar dan arogan bahkan menakutkan. Citra negatif yang paling kentara adalah mengenai carok dan *clurit*, karena Madura identik dengan keterbelakangan atau kekasaran. Hal ini harus di akhiri seperti yang terjadi di Banyuwates sebuah tradisi Madura yang masih lekat di daerah itu , carok adalah tradisi perkelahian di Madura yang biasanya menggunakan senjata tajam celurit carok selalu terjadi karena menyangkut masalah harga diri yang bermula dari satu lawan satu hingga ahirnya merambat ke yang lain yang bersifat kelompok yang pada akhirnya jatuhnya korban yang terbunuh mengakibatkan konflik meluas ke beberapa pihak seperti orang orang terdekat pelaku carok itu sendiri (Huub, 2011: 44).

Dalam hal ini penghormatan yang berlebihan atas martabat dan harga diri etniknya itu seringkali menjadi akar penyebab dari berbagai konflik dan kekerasan. Seringkali keunikan budaya melahirkan perilaku sikap defensif sebagian kelompok etnik Madura. Misalnya, orang Madura dikenal mudah tersinggung harga dirinya dan kemudian marah-marah, kemudian memilih alternatif solusi atas ketersinggungannya itu melalui kekerasan fisik, berupa carok. Sikap orang Madura yang dengan mudah dapat tersinggung harga dirinya, dan

melampiaskannya dengan melakukan tindak kekerasan perilaku dan pola kehidupan kelompok etnik Madura tampak sering dikesankan atas dasar prasangka subjektif oleh orang luar Madura. Kesan demikian muncul dari suatu pencitraan yang tidak tepat, baik berkonotasi positif maupun negatif (Ahmad, 2007: 30).

Pada dasarnya Carok berada dipersimpangan jalan antara tradisi atau adat istiadat yang harus dilakukan demi membela harga diri dan carok sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat dan sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh Negara dan agama karena tergolong tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dalam konteks legalitas, carok merupakan manifestasi keberanian pelakunya melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum formal (KUHP). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 354, carok dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap badan dengan unsur-unsurnya: 1) dengan sengaja melukai orang lain, yaitu kemungkinan akibat yang ditimbulkan carok salah satunya adalah luka berat, 2) melukai berat orang lain tersebut terutama adalah merupakan maksud atau niat dari para pelaku carok, 3) (Latief, 2013: 24). Penganiayaan berat yang dilakukan menyebabkan orang lain meninggal (Soesilo, 1991: 35). Adapun konsekuensi hukum terhadap para pelaku carok adalah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 dan 340 tentang kejahatan terhadap nyawa orang, serta KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan.

Pelaku carok sendiri dilakukan oleh kaum blater. Yang mana blater itu sendiri sebuah julukan terhadap Masyarakat Madura, yang pada intinya adalah Sesepuh Masyarakat sekitar. Tidak semua orang bisa disebut blater, hanya orang-orang tertentu yang bisa dijuluki dengan kata ini. Maka bisa dikatakan juga nama Blater adalah sebuah penobatan dari Masyarakat di mana blater itu berada. Sebuah penobatan Blater tentunya bermacam-macam, ada yang menobati karena kewibawaannya ada juga karena kabengallah (keberaniannya).

Bagi Masyarakat Madura blater merupakan salah satu tokoh terpenting selain dari pada pemimpin yang formal maupun nonformal (Kosim, 2011: 5).

Banyak masyarakat setempat berpendapat bahwasanya sebuah desa tanpa adanya seorang blater khususnya di daerah Banyuates maka desa tersebut bisa dikatakan desa yang miris, karena kenapa? Adanya seorang blater di desa itu bisa menjadi orang yang bisa di *Rembugghi* (musyawarah), yang *ngetoah* (dituakan) dalam segala bidang, khususnya musyawarah itu sendiri. Namun ada sisi negative dari orang blater tersebut. Seperti halnya perebutan wilayah kekuasaan di daerah ini yang terjadi pada Minggu malam tanggal 13 bulan 10 2013 terjadi bentrokan yang melibatkan dua tokoh warga setempat. Dan carok tersebut terjadi sekitar pukul 10 dengan banyaknya botol dan batu yang dijadikan lemparan ke arah lawan dan banyaknya warga yang memegang celurit. Hal ini sudah tidak bisa lagi di keluarkan dengan jalan musyawarah sehingga menyebabkan konflik mendasar yang menyebabkan carok antar dua kubu blater itu sendiri (Kosim, 2011: 6)

Seperti yang terjadi baru-baru ini di Desa Banyuates yang mana konflik yang terjadi banyak menyeret beberapa orang dari kedua belah pihak dari pelaku konflik itu sendiri dan konflik itu terjadi karena perebutan wilayah kekuasaan proyek pasar di daerah Banyuates. Hal itu terjadi mungkin sudah ada rembukan antara pihak terdekat atau family antar masing-masing kubu. Sehingga menyeret beberapa pihak terdekat akan masalah ini, perebutan wilayah kekuasaan itu sendiri terjadi karena keuntungan dari wilayah yang disengketakan itu tinggi sehingga yang merasa bisa menguasai wilayah tersebut akhirnya bentrok dan tidak bisa mencari jalan keluar yang lebih baik dalam kategori konflik ini bisa di katakan carok karena memang kekerasan yang terjadi dilakukan secara berhadap-hadapan. Karena di katakan carok apabila para pelaku melakukan tindak kekerasan secara berhadap-hadapan entah itu jatuh korban ataupun tidak diantara para pelaku itu sendiri (Rozaki, 2004: 34).

Pada dasarnya konflik yang terjadi semata-mata sudah menjadi tradisi di daerah tersebut karena harga diri sangat di junjung tinggi seperti masyarakat Madura pada umumnya. Harga diri adalah kehormatan yang penting bagi masyarakat di daerah tersebut. Apabila harga diri sudah merasa direndahkan jalan yang bersifat kekerasan bukan tidak mungkin menjadi jalan satu-satunya sebagai upaya penyelesaiannya seperti halnya di daerah ini Desa Banyuates Kec. Banyuates Kabupaten Sampang.

Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Carok dan Perebutan Lahan Kekuasaan Antar Blater (Study Kasus Carok Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang 2013).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya carok dalam perebutan lahan kekuasaan pada blater di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ?
2. Mengapa terjadi carok dalam perebutan lahan kekuasaan pada blater di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya carok dalam perebutan lahan kekuasaan pada blater di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak terjadinya carok dalam perebutan lahan kekuasaan pada blater di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. literatur ilmiah untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang carok dan kekuasaan

2. Pengayaan teori-teori konflik carok dan kekuasaan

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang carok dan perebutan kekuasaan
2. Memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat tentang dampak carok dan perebutan kekuasaan.

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu tentang carok dan perebutan kekuasaan antar blater, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu sebagai relevansi dengan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tentang “*Analisa konflik sosial nelayan atas batas penangkapan di perairan selatan bangkalan kecamatan kwanyar*” (2012) Alhasil dalam penelitian ini adalah kondisi ini sumber daya mengalami tekanan eksploitasi berlebih (overfishing) yang akhirnya berdampak terpuruknya ekonomi dalam skala kecil. Dalam penelitian ini konflik yang ada lebih mengarah ke permasalahan pelanggaran terhadap batas penangkapan ikan sehingga menimbulkan konflik antar kelompok di laut Kwanyar dan juga menimbulkan tindakan kekerasan antar nelayan serta dalam penelitian ini menjelaskan upaya pencegahan konflik (*resolving*) di lakukan dengan penentuan batas wilayah, mengadakan sosialisasi perundangan perikanan kepada masyarakat, meningkatkan patroli aparat kamlu (keamanan laut) dalam hal ini pengawasan dan penegakan hukum perikanan, serta pengaturan penggunaan alat tangkap. Penelitian yang di buat oleh Rahmawati berjudul analisa konflik sosial nelayan atas batas penangkapan di perairan selatan Bangkalan kecamatan Kwanyar yang di buat pada tahun 2012 untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat.

Selain itu penelitian yang di tulis oleh Diska Ariesta Fairiani tentang “*Konflik Atas Perebutan Lahan Garam, (Study Kasus Deskriptif Kualitatif Pada Masyarakat Petani Garam Yang Berupaya Menuntut Haknya Kepada PT.Garam selaku pemegang kekuasaan atas hak lahan garam di Desa Pinggir Papas Kabupaten Sumenep)*” (2010). Perebutan atas lahan garam yang terjadi bertahun-tahun kembali mencuat pada bulan Juli 2009, hal itu dipicu oleh peristiwa pembebasan lahan yang telah dibebaskan oleh PT.Garam pada tahun 1975 terhadap pemilik lahan. Sehingga hal ini memancing konflik antara petani garam (ahli warisnya) dengan PT. Garam selaku pemegang kekuasaan atas hak lahan dalam penelitian ini juga dijelaskan konflik petani Garam juga terjadi antar sesama petani sehingga menimbulkan retaknya hubungan sosial antar petani Garam. Penelitian yang di lakukan oleh Diska Ariesta Fairiani (2010) membahas tentang perebutan hak lahan masyarakat desa Pinggir terhadap PT. GARAM selaku pemegang hak lahan.

Selain itu juga penelitian R.aryo Bagus Pratama tentang “*Fenomena konflik antar blater di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*” (2015). Penelitian ini membahas tentang bagaimana konflik antar blater terjadi atas perebutan wilayah kekuasaan, pembagian pendapatan dan kekerasan antar blater yang mengakibatkan carok antar blater. Sehingga faktor wilayah kekuasaan itulah maka, kemudian terjadilah carok.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tiada lain dan tiada bukan kecuali sama-sama membahas tentang carok sebagai identitas blater untuk menyelesaikan persoalan yang konfleks yang terjadi dimasyarakat baik itu masalah pribadi, keluarga, masyarakat, yang berkaitan langsung dengan blater. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan teori-teori yang akan menjadi dasar penulis laporan penelitian ini. Teori tersebut mencakup konsep-konsep pemikiran maupun metode-

metode yang dipilih untuk memecahkan masalah atau permasalahan yang dihadapkan dalam penelitian ini.

2.2.1 Teori Konflik

Manusia adalah makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. *Dalam kamus Indonesia* yang disusun Poerwadarminta(1976) konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri biasanya muncul kedalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan. Sebagai contoh, dalam lingkungan keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak banyak kasus pertentangan ide tercipta, seperti jenis kursi baru apa yang harus di beli untuk mengganti kursi lama di ruang tamu. Ayah mempunyai ide, kursi baru itu adalah dari rotan berwarna coklat alami, ibu mempunyai ide dengan warna berbeda dari ayah serta anaknya juga memiliki ide yang berbeda dari ibu dan ayah. Beberapa ide yang bertentangan mengenai kursi ini menjadi gerakan persinggungan diantara keluarga sehingga menyebabkan ketegangan sosial pada tingkat tertentu pada sistem kehidupan keluarga tersebut.

Pengertian konflik diatas sesuai apa yang didefinisikan Pruitt dan Rubin dengan mengutip Webster bahwa” konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*persived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan” (Pruitt dan Rubin, 2004: 10). Jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada didalamnya konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat di dalamnya. Artinya dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi maka ditemukan pula aspirasi dan aktor. Konflik biasanya muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antara orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dan Negara (*vertical conflict*), konflik antar

Negara (state conflict). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangan. Masyarakat manusia di dunia pada dasarnya memiliki konflik pada skala antara perorangan sampai antar negara.

2.2.2 Jenis-Jenis Konflik

Ada dua jenis konflik, pertama dimensi vertikal atau “konflik atas” yang dimaksud adalah antara elite dan massa (rakyat). Elite disini bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat (pusat pemerintahan), kelompok bisnis atau aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakannya instrumen kekerasan negara, sehingga timbul di kalangan massa (rakyat). Kedua konflik horisontal yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) sendiri. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (sejak pertengahan 90-an), di rasakan setidak-tidaknya dua jenis konflik horisontal, yang tergolong besar pengaruhnya: (1) konflik antar agama, khususnya antar kelompok agama islam dan kelompok agama nasrani (protestan dan katholik). Konflik jenis ini mengemukakan di berbagai daerah seperti Ambon dan Jakarta atau beberapa daerah lainnya; (2) konflik antar suku, khususnya antara suku Jawa dan suku lainnya di pulau Jawa. Selain itu muncul konflik lainnya seperti konflik antar suku Madura dan Melayu di Kalimantan Barat seperti di Pontianak dan Sambas (Susan, 2009: 92).

Selain jenis konflik, kita perlu mengenal istilah tipe konflik yang akan menggambarkan persoalan sikap, perilaku dan persoalan yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan (Susan, 80 : 2009). Tanpa konflik menggambarkan situasi yang stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, akan tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini. Pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah kekerasan. Kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan. Pada masyarakat yang bercirikan individual, seperti Thailand kemungkinan bermusuhan dalam

sekala besar dan menimbulkan kekerasan komunal sangat rendah. Kasus konflik di daerah selatan lebih banyak di pengaruhi oleh kebijakan negara yang tidak akomodatif.

Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu di angkat ke permukaan agar bisa di tangani. Kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum merupakan jaminan bahwa dalam masyarakat tidak ada permusuhan dan pertentangan. Kenyataan ini bisa kita temukan dalam masyarakat Indonesia dalam masa orde baru. Masyarakat dalam orde baru tampak harmonis dan damai, dan kecilnya pertentangan antara anggota-anggota masyarakat baik dalam dimensi ekonomi, etnis maupun agama. Akan tetapi di balik stabilitas, keharmonisan dan perdamaian tersebut ternyata terdapat konflik latin yang begitu besar. Hal ini di buktikan dalam orde baru dan struktur kekuasaan yang runtuh.

Konflik terbuka adalah situasi dimana konflik sosial telah muncul kepermukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi berbagai penyebab dan efeknya. Kasus konflik di Ambon pada awal tahun 1999, di Kalimantan Barat pada tahun 1999 dan juga di Poso Sulawesi. Pada situasi konflik terbuka muncul pihak-pihak berkonflik yang semakin banyak dan aspirasi yang berkembang cepat (Susan, 52: 2009).

2.2.3 Konflik Kekuasaan

Dahrendorf menolak utopia teori fungsionalisme yang lebih menekankan konsensus dalam sistem sosial secara berlebihan. Wajah masyarakat menurutnya tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Baginya, perlembagaan melibatkan kelompok-kelompok terkordinasi (ICA) yang mewakili peran-peran organisasi yang dibedakan, mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial

ditentukan oleh kekuasaan. Ia mendefinisikan kekuasaan "kemungkinan bahwa suatu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari dasar kemungkinan itu menyerah" (Dahrendorf, 1959: 166).

Bagi Dahrendorf konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutkan sebagai "*integrated into a common frame of reference*". Lebih lanjut ia menyatakan bahwa unit analisis dalam sosiologi konflik keterpaksaan dalam menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial (Dahrendorf 1959: 164-165). Hal ini tentu berlawanan dari tradisi fungsionalisme struktural yang melihat unit analisis sosiologi adalah konsensus diantara berbagai organisasi sosial sehingga memungkinkan berbagai kerja sama.

Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Ia mendefinisikan kekuasaan: "kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari dasar kemungkinan itu menyerah" (Dahrendorf, 1959:166). Menurut Wallance dan Wolf, esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi pandangan Dahrendorf konflik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan. Saat kekuasaan merupakan tekanan (*coersive*) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimate dan oleh sebab itu, dapat dilihat sebagai hubungan "authority", Beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lain (Turner, 1978:144). Sehingga tatanan sosial menurut Dahrendorf, di pelihara oleh proses penciptaan hubungan-hubungan wewenang

dalam bermacam-macam tipe kelompok terkordinasi yang ada hingga seluruh lapisan sistem sosial kekuasaan dan wewenang adalah sumber langka yang membuat kelompok-kelompok saling bersaing dan berkelahi. Relasi dalam konflik antara kelompok-kelompok itu adalah redistribusi kekuasaan atau wewenang. Kemudian menjadi konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial (Dahrendorf 1959).

Dahrendorf menyebutkan teori konfliknya sebagai teori konflik dialektis yang menjelaskan proses terus menerus distribusi kekuasaan dan wewenang diantara kelompok-kelompok terkordinasi. Sehingga kenyataan sosial, bagi Dahrendorf merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkordinasi dari sistem sosial. Antony Giddens menyebut dinamika konflik tersebut sebagai dialektika kontrol dalam sistem sosial (*dialectic of control in social sistem*). Pihak-pihak berkonflik dengan kekuasaan yang mereka miliki memiliki kapasitas transformatif sehingga mereka mampu menciptakan negosiasi dan menciptakan suatu gerakan sosial untuk mencapai kepentingan yang menjadi tujuan mereka (Giddens, 1986: 11).

Dahrendorf berpendapat bahwa di setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk kepada struktur itu seperti yang dikatakan oleh Ralf Dahrendorf (1959:176). Secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah di analisa bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan kekuasaan. dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya. Sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di bawahnya.

Menurut Dahrendorf, konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar

kelompok dapat di lihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada. Pandangan Dahrendorf ini sebenarnya jauh lebih ruwed dari pada yang di uraikan di atas , namun inti pemikirannya terkandung dari 4 proposisi berikut :

1. Setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada proses perubahan ;perubahan sosial terjadi di mana mana.
2. Setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dalam konflik ; konflik sosial terjadi di mana saja
3. Setiap unsur dalam satu masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahan.
4. Setiap masyarakat berdasarakan atas penggunaan kekerasan oleh setiap anggotanya terhadap anggota yang lain.

Ringkasnya, Dahrendorf menyatakan, konflik kelas(konflik mengenai hubungan kekuasaan atau yang muncul di luar huubungan kekuasaan) menyebabkan kan perubahan struktur (perubahan nilai dan pranata).konflik seperti itu merembes karena hubungan kekuasaan merembes.akibatnya perubahan terjadi di mana mana.

Menurut Dahrendorf distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog.

Kekuasaan dan wewenang menurut Dahrendorf (George Ritzer, 1985:31) senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Kekuasaan itu selalu memisahkan dengan tegas

antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur.

Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan tertentu selalu dinilai objektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan dengan posisi individu yang termasuk ke dalam golongan itu. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongan itu yang oleh Dahrendorf disebut sebagai peranan laten. Ia membedakan golongan yang terlihat konflik itu atas dua tipe yaitu kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semua yang lebih luas.

Kelompok kepentingan ini memiliki struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan ini yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat; kemudian terdapat mata rantai antara konflik dan perubahan sosial, konflik ini memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlihat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat

radikal, begitu pula jika konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan lebih efektif.

2.2.4 Faktor-Faktor Konflik

a. Konflik Data

Konflik ini dapat terjadi karena kekurangan informasi, kesalahan informasi (*Miss Information*), adanya perbedaan pandangan, perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap data. Data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu perbuatan hukum, karena itu akurasi menjadi sangat penting, karena jika ada akan berakibat fatal mengambil keputusan. Karena itu sebelum melakukan suatu perbuatan hukum tertentu seorang harus mencari informasi atau data se jelas-jelasnya dan sumber informasi harus jujur dalam memberikan informasi tersebut, jika tidak dapat menyesatkan pihak lain serta dapat menimbulkan konflik (Husni, 2004: 3).

b. Konflik Kepentingan

Dalam melakukan suatu aktifitas seseorang memiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan inilah yang memotivasi seseorang untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini konflik kepentingan dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: adanya perasaan bersaing, adanya kepentingan substansional dari para pihak, adanya kepentingan prosedur, adanya kepentingan psikologi. Ke empat hal tersebut menyebabkan timbulnya konflik kepentingan di antara para pihak, karena dalam suatu hubungan kerja biasanya

melahirkan perasaan persaingan, untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Begitu pula halnya dengan kepentingan substansial yang merupakan tujuan seseorang untuk melakukan hubungan tertentu, misalnya seorang pekerja berkepentingan, mendapatkan upah yang tinggi, sedangkan bagi pihak perusahaan orientasinya pada keuntungan, sehingga setiap pengeluaran harus ditekan seminim-minimnya. Demikian hal dengan kepentingan prosedur dan psikologi (Husni, 2003: 7).

2.2.5 Landasan Konseptual

2.2.5.1 Konsep Carok

Pada umumnya, orang luar Madura cenderung mengartikan setiap bentuk kekerasan (baik yang berakhir dengan kematian atau tidak) yang dilakukan orang Madura sebagai carok, karena pada dasarnya apa yang dikatakan carok itu apabila kekerasan yang terjadi baik itu menimbulkan kematian atau tidak dilakukan secara berhadap-hadapan dan apa bila hal itu dilakukan secara *nyallep* itu dikategorikan bukan carok, apabila carok yang dikatakan masyarakat zaman sekarang itu dilakukan dengan cara *nyellep* maka makna kejantanannya akan hilang. Meskipun pelaku langsung menyerahkan diri ke kepolisian ini berarti bukan bermakna kejantanannya (sebagai pertanggung jawaban atas tindakannya) melainkan suatu upaya untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian sebagai serangan balasan dari pihak keluarga (Wiyata 2002).

Dalam hal ini carok itu sendiri diawali masalah tingginya harga diri (*marthabat*) orang Madura dalam kaitannya dengan perasaan *maloh* yang di timbulkan ketika terjadi pelecehan. Kedua hal ini merupakan faktor pemicu utama orang Madura melakukan carok, selain faktor lainnya. Sebagaimana telah disinggung pada bagian lain dimuka , semua kasus carok yang di teliti. Begitu pula kasus carok lain yang terjadi di Madura, selalu bersumber dari perasaan *maloh* atau terhina dari diri si pelaku karena harga dirinya dilecehkan oleh orang lain.

Dengan kata lain, orang Madura yang dilecehkan harga dirinya akan merasa malu (*maloh*) kemudian melakukan carok terhadap orang yang melecehkan itu. Di sini perasaan *maloh* tidak selalu hanya muncul secara sepihak, tetapi ada kalanya pada kedua pihak. Contohnya hal itu melibatkan saudara (*bheleh*) yang tidak terima atas pelecehan terhadap harga dirinya sebagai saudara sepupu (*taretan dhelem*) hal itulah yang menimbulkan perasaan malu (*maloh*).

- Dinamika Carok

Carok pada zaman dulu, carok dan celurit laksana dua sisi mata uang. Satu sama lain tak bisa dipisahkan. Hal ini muncul dikalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda abad 18 M. Carok merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan). Celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan di Madura dan carok pada zaman dulu dilaksanakan secara terang-terangan ataupun berhadap-hadapan. Carok pada masa lalu, merupakan perang tanding antara satu orang melawan satu orang atau lebih. Sebelum perang tanding, masing-masing mengadakan perjanjian mengenai penentuan tempat caroknya, hari, dan waktunya.

Carok pada zaman sekarang, sedangkan carok yang terjadi sekarang tidak lagi saling berhadap-hadapan tapi mencari kelengahan musuhnya untuk melampiaskan niatnya. Usai membunuh, pelaku juga melarikan diri. “Memang ada satu, dua orang yang melapor ke petugas, tapi itu jarang terjadi. Malah yang lebih banyak kabur menyelamatkan diri. Walau pelaku sudah dihukum berat lebih dari 10 tahun, tidak membuat kapok pelakunya. Dikatakan, yang paling memicu timbulnya Carok, manakala harga diri dipermalukan.

Dengan perkembangannya, Carok tidak bisa hanya dipahami sebagai sebuah institusi yang hanya menekankan aspek kekerasan. Pada suku ini, tindakan kekerasan mendapat pembenaran secara kultural dan bahkan mendapat persetujuan sosial jika tindakan itu bertujuan mempertahankan harga diri dan kehormatan. Tidak ada peraturan resmi dalam

pertarungan ini karena Carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan “keluar” dari masalah yang pelik (Wiyata 2002).

2.2.5.2 Konsep Kekuasaan

Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah pihak pertama, perumusan yang paling umum dikenal yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi pelaku seorang pelaku lain. Dalam hal ini kekuasaan selalu berlangsung minimal antara dua pihak jadi di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan kekuasaan, pengertian kekuasaan menurut beberapa ahli kepemimpinan: ”Kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain” (House, 1984). ”Kekuasaan adalah potensi untuk mempengaruhi orang lain” (Bass, 1990) ”Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dan kemampuan untuk mengatasi (bertahan dari) pengaruh orang lain yang tidak diinginkan” (Wagner dan Hollenbeck, 2005). ”Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan” (Robbins dan Judge, 2007). Kekuasaan mengandung suatu potensi/kemampuan yang belum tentu efektif jika dilaksanakan, dan suatu hubungan ketergantungan. Bisa saja seseorang memiliki suatu kekuasaan namun tidak digunakan oleh orang tersebut.

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi yang tidak akan terjadi jika tidak digunakan oleh orang yang memilikinya. Kekuasaan juga merupakan suatu fungsi ketergantungan. Semakin besar ketergantungan Y kepada X, maka akan semakin besar kekuasaan X dalam hubungan tersebut. Jadi ketergantungan didasarkan pada alternatif yang

dipersepsikan oleh Y dan pentingnya alternatif yang ditempatkan oleh Y untuk dikendalikan oleh X. Seseorang hanya dapat memiliki kekuasaan atas diri orang lain, jika ia dapat mengendalikan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Contoh: Orang-tua memiliki kekuasaan yang sangat besar atas anaknya, pada saat anak tersebut kuliahnya masih dibiayai oleh orang-tuanya. Ketika si anak telah lulus, dan kemudian ia bekerja serta memiliki pendapatan sendiri, maka kekuasaan orang-tua atas dirinya semakin berkurang.

2.2.5.3 Konsep Blater

Dalam bukunya *Peasant War Germany Dan Class Struggle In France*, Mark dan engels sedikit mengulas tentang lumpenproletar sebagai sesuatu pseudo kelas. Lumpenproletar mencakup jembel, luntang-lantung, preman, bajingan, penjahat, dan semua orang yang terdampak dari hubungan-hubungan produksi pokok. Pengangguran miskin, pekerja serabutan yang jarang bekerja, juga bisa di masukkan ke dalam kelas ini. Lumpenproletar tiada lain adalah 'kelas buangan' yang isinya campur-aduk orang dari berbagai asal-usul kelas, terutama mereka-mereka yang terdampak dari saluran-saluran kehidupan 'wajar', baik di pedesaan maupun di perkotaan yang tumbuh dalam industrialisasi. Mereka menempati wilayah-wilayah gelap dalam gagap-gempita kapitalisasi segala sektor kehidupan. Mark memasukkan lumpenproletar ke dalam katagori 'cadangan industrial' atau kelebihan penduduk relatif yang memelihara tingkat penghisapan tenaga kerja oleh kapital. Menurut Mark, dalam kapitalisme lumpenproletar bisa juga menjadi alat akumulasi kapital borjuasi lewat pemerasan, pengorganisasian pengemis, atau penguasaan ekonomi gelap dan jasa-jasa ilegal seperti penyelundupan, pelacuran, perjudian, penagih utang, pembunuh bayaran, keamanan, dan sebagainya. Sedangkan penelitian tentang blater dan aneka rupa bajingan di madura, abdul Rozaki (2006) mengaitkan keberadaan preman sebagai satu katagori sosial dengan kondisi sosio-ekologis sistem tegalan yang dominan di madura. Menurut Rozaki keterbatasan ekologis yang berujung pada kondisi kemelaratan di

kalangan warga desa sulit di pungkiri punya andil dalam penumbuhkan 'budaya' preman madura. Menjadi bandit atau blater merupakan salah satu jalan keluar dari sempitnya saluran penghidupan wajar dan memasuki 'jalan hitam'.

Sementara itu henk schulte Nordholt (2002), seorang sarjana sejarah dari belanda, mengaitkan preman kontemporer dengan para jago dari masa penjajahan belanda dahulu. Para jago tiada lain adalah bandit-bandit pendalaman yang berada di lingkaran kekuasaan lokal beserta intrik perebutan kekuasaan antarelitnya.

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya, melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau informan, bahkan populasi dan informan yang diambil sangat terbatas. Jika data sudah mendalam cukup menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari informan lain (Krisyantono, 2006).

Sesuai dengan perumusan masalah secara spesifik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus adalah penelitian yang lebih memfokuskan pada kasus tertentu yang menjadi persoalan peneliti dalam kehidupan sosial..

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Secara umum data dalam penelitian dibagi pada dua bagian. Yaitu data bersifat primer dan data bersifat skunder (Suyanto, 55: 2011). Data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari informan. Data seperti demikian dapat dihasilkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat melalui fakta-

fakta, permasalahan, penelitian, dan tulisan yang sudah ada dan terbukti kapasitas keilmiahannya.

3.1.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber data yaitu:

a. Metode Observasi

Adapun jenis observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan. Di mana peneliti melibatkan diri secara langsung dalam sisi aktivitas keseharian objek yang diamati selama proses observasi berlangsung, tanpa memberi tahu atau menampakkan identitas peneliti sebagai *Observer* (Sugiyono, 145: 2010).

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan untuk mencapai maksud tertentu (Sugiyono, 137: 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam. Peneliti menggunakan wawancara mendalam karena ingin mengetahui persoalan tersebut secara mendalam dan valid (Sugiyono, 141: 2010).

3.5.2 Data Skunder

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang di dalamnya berisi catatan, keterangan, serta bukti-bukti yang telah lampau. Dokumentasi bisa berupa tulisan. Misalnya buku, peraturan pemerintah setempat, kebijakan, dan catatan. Selain dalam bentuk tulisan, dapat pula berupa gambar, photo, lukisan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini dokumentasi dapat diperoleh melalui lembaga, instansi, dan lokasi penelitian yang diteliti.

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan merupakan jenis metode pengumpulan data skunder yang didapat melalui pembacaan terhadap buku untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Namun tidak semua buku

dapat dijadikan kepustakaan terkecuali buku yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.1 Metode Penentuan Informan

Adapun dalam penentuan atau pencarian informan, peneliti di sini menggunakan jenis (*Purposive Sampling*). Yaitu peneliti menentukan seorang informan yang dinilai mempunyai kriteria khusus serta memiliki kredibilitas untuk menjawab, menjelaskan, menerangkan, menguraikan, dan memberitahukan setiap pertanyaan yang oleh peneliti dibutuhkan Jawabannya (Sugiyono, 2012: 85). Peneliti menentukan jumlah informan berdasarkan beberapa kriteria yaitu:

1. Blater berumur 35-60 berdomisili di Desa Banyuates, punya anak buah
2. Tokoh Masyarakat (Kader, dan Kadus)
3. Masyarakat asli Desa Banyuates

3.1.4 Metode Pengolahan Dan Analisa Data

Analisis merupakan cara berpikir ilmiah yang sistematis dan terstruktur untuk mencari dan menyelesaikan persoalan dengan mencari bagian, menghubungkan antar bagian untuk digabungkan dalam keseluruhan bagian (sugiyono, 243: 2012).

a. Analisis Data Sebelum Lapangan

Analisis data sebelum lapangan merupakan satu kerja ilmiah seorang peneliti melalui analisis terhadap hasil studi pendahuluan yang didapat dari berbagai referensi (Sugiyono, 245: 2012). Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, serta data skunder lainnya yang memiliki kadar otentitas dan standart keilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data Lapangan

Pada tahap analisis data di lapangan, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan tertentu (Sugiyono,

243: 2012). Semisal, pada saat wawancara berlangsung peneliti sudah melakukan analisis terhadap data yang sudah didapat dari informan. Serta menjabarkan setiap data yang telah diamati.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data lapangan berdasarkan model Spradley. Dalam model Spradley seorang peneliti kualitatif yang hendak memasuki lapangan harus memulai dengan langkah-langkah sistematis. Meliputi menetapkan informan kunci, kemudian melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan deskriptif seputar permasalahan yang diangkat (Sugiyono, 253: 2010).

c. Analisis Data Selesai di Lapangan

Setelah peneliti melakukan analisis data di lapangan, selanjutnya peneliti melanjutkan analisis berdasarkan analisis domain. Analisis domain dilakukan setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dialokasi penelitian. Dalam analisis domain ini peneliti mencari gambaran-gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau lebih tepatnya disebut dengan objek penelitian (Sugiyono, 256: 2010). Misal peneliti mencari tahu gambaran umum perihal kegiatan serta sosial budaya setempat. selanjutnya peneliti memilih kategori khusus dan menentukannya dalam satu model teoritis, yang kemudian dirangkai dengan penjabaran dan penjelasan secara lebih luas melalui observasi terfokus. Tahap ini merupakan tahap kedua dari analisis setelah lapangan, yang berupa analisis taksonomi. Setelah peneliti menemukan gambaran yang tepat dijadikan pijakan, maka data tersebut dijadikan kesimpulan.

3.1.5 Metode Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data penelitian ini, maka peneliti di sini melakukan strategi-strategi ilmiah dengan berdasarkan pada teknik Triangulasi data sebagai pendekatan mengukur sah atau tidaknya data yang didapat. Triangulasi data adalah pengumpulan data secara menyeluruh yang didapat melalui berbagai sumber dan cara, seperti wawancara,

observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 273: 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan keabsahan data berdasarkan tekni triangulasi sumber. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan dan pengamatan pada setiap informan yang dijadikan sumber data.

3.1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Madura, tepatnya: di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dengan maksud dan tujuan untuk menemukan tujuan penelitian.

Karena di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates mengetahui konflik yang terjadi di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

3.1.6.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu 6 bulan dari tanggal 10 September-Selesai 2015. Mulai dari melakukan pengamatan selama satu bulan serta pada bulan berikutnya dilakukan penulisan dan analisis data. Sedangkan waktu dalam melakukan pencarian data dengan informan kami lakukan secara sewaktu-waktu kondisional karena hal tersebut sangat berhubungan dengan kesempatan penelitian berinteraksi dengan pelaku konflik yang berada di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Sampang.